

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Rancangan kawasan ruang terbuka hijau memiliki haluan pada proses evaluasi yang mana mewujudkan kecocokan, keharmonisan dan dapat juga menyelamatkan kawasan sekitar. Perencanaan ruang terbuka hijau akan berdampak positif bagi keserasian ruang lingkung RTH dan kawasan buatan ruang terbuka hijau adalah inti dari sebuah perencanaan kota sehat. Penataan ruang terbuka hijau pada kota bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan perkotaan, yang mewujudkan keseimbangan antara lingkungan buatan dan alam, serta meningkatkan kualitas lingkungan kota yang indah, sehat, nyaman, dan bersih .<sup>1</sup>

Salah satu tujuan pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di dalam kota adalah membuat kualitas visual yang diperlihatkan oleh vegetasi. Dengan semakin banyaknya ruang terbuka yang ditanami tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan hijau yang mempunyai strata banyak, dan keanekaragaman tinggi yang meningkatkan kualitas visual berupa keindahan tata hijau. Dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang memadai maka warga kota akan merasakan manfaat dari ruang terbuka hijau yang berupa nilai klimatologis, ekologis, edukatif, dan estetika. Perencanaan ruang terbuka hijau pada dasarnya merupakan upaya untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

meningkatkan kualitas serta kuantitas lingkungan yang baik untuk warga perkotaan, baik berupa lingkungan hidup maupun buatan, agar dapat lebih memberi manfaat kepada warga-warga perkotaan dalam konteks ini yang harus menjadi pegangan adalah peningkatan peran dan fungsi dari ruang terbuka hijau itu sendiri, serta lebih memberi stimulus pada kesadaran warga perkotaan akan pentingnya ruang terbuka hijau yang secara langsung memberi kenyamanan serta sebagai penyeimbang lingkungan terbangun.<sup>2</sup>

Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau kota terutama dalam lingkungan warga perkotaan merupakan bagian-bagian penting dalam mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik itu secara ekologis maupun sosial-psikologis, akan tetapi pada saat ini perbandingannya semakin berkurang dikarenakan adanya dampak dari tingginya pertumbuhan populasi di perkotaan yang terus menerus meningkat. Peningkatan populasi secara tidak langsung diikuti dengan adanya peningkatan kebutuhan akan lahan bermukim dan konsumsi energi. Hal ini tidak berimbang oleh pengendalian lahan yang membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Perbandingan lahan yang tertutup akibat padatnya penduduk di perkotaan membuat ruang-ruang terbuka menjadi area terbangun, diantaranya gangguan tersebut meningkatnya temperatur udara, polusi udara, dan frekuensi banjir. Penataan ruang terbuka hijau perkotaan merupakan bagian dari strategi perencanaan kota dalam membatasi pembangunan serta mengatasi dampak

---

<sup>2</sup> Samsudi. 1 Februari 2010 : *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Volume 1

ekologis dalam berbagai macam aktivitas warga terkait gangguan proses alam pada lingkungan kota.<sup>3</sup>

Ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yaitu intrinsik dan ekstrinsik, fungsi intrinsik sebagai fungsi ekologis yang memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara sedangkan fungsi ekstrinsik terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Fungsi sosial budaya : menggambarkan ekspresi budaya lokal yang merupakan media komunikasi warga kota, wadah dan objek pendidikan, dan tempat rekreasi.
- b) Fungsi ekonomi : sumber produk yang bisa dijual seperti buah, daun, tanaman bunga dan bisa juga menjadi bagian dari usaha perkebunan, pertanian, kehutanan dan lain-lain.
- c) Fungsi estetika : memperindah lingkungan kota, meningkatkan kenyamanan baik dari skala mikro maupun makro<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dipahami bertujuan untuk melakukan penataan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Undang-undang ini dibutuhkan untuk menghadapi berbagai permasalahan kota di Indonesia, misalnya penurunan kualitas permukiman, alih fungsi lahan, serta kesenjangan antar wilayah dan di dalam wilayah (Ardiansah dan Oktapani 2019). Pemerintah dalam UU No. 26 Tahun 2007

---

<sup>3</sup> Widya Atsary Rahmy dkk. 2021 : *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Kawasan Padat*, Studi Kasus di wilayah Tegallega, Bandung, ( Bandung : Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Vol.1 No.1) Hlm 21

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M2008. *Tentang Pendoman penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.*

secara jelas memandatkan bahwa RTH harus diatur dalam tata ruang suatu wilayah dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pada prinsipnya proporsi 30% luas RTH kota yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut merupakan ukuran minimal untuk keseimbangan ekosistem kota.

Keberadaan RTH publik di Kota Jambi menyebar di 11 kecamatan. RTH publik tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yaitu RTH Hutan Kota, RTH Taman Kota, RTH Perumahan, RTH Pemakaman, RTH Sempadan Sungai dan Danau, RTH Jalur Hijau Jalan dan RTH Lahan Pertanian.

Tabel 1.1  
Jenis RTH Publik Kota Jambi<sup>5</sup>

NO	Jenis RTH Publik	Luas(Ha)	Lokasi
1	RTH Jalur Hijau Jalan	19,30	Kota Jambi ( Tersebar )
2	RTH Hutan Kota	89,97	Kota Baru, Telanaipura, Kota Jambi Timur
3	RTH Taman Kota	12,87	Kota Jambi
4	Lapangan & Saran Olahraga	21,76	Kota Jambi
5	RTH Sempadan Sungai	1.900,28	Kota Jambi
6	RTH Sempadan Danau	137,91	Kota Jambi
7	RTH Pemakaman	18,18	Kota Baru dan Telanaipura
8	RTH Perumahan	29,49	Kota Jambi
9	Taman Kantor/Instansi	1,93	Kota Jambi
	Jumlah	2.231,69	

*Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*

---

<sup>5</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, *Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2025*

Tabel 1.2  
Jumlah Taman di Kota Jambi<sup>6</sup>

No	Nama Jalan	Luas (M2)
1	Adipura	1.298,00
2	Anjungan Kota	4.000,00
3	Arena Remaja	20.086,00
4	Belakang Persijam	221,55
5	Buluran Kenali	363,3
6	Depan Museum Perjuangan	77,78
7	Genbi	207
8	Jaksa	728
9	Jembatan Makalam	10
10	Taman Kambang	155,06
11	Kongkow	11.274,52
12	Makalam	1.017,25
13	Masjid Nurdin	191,1
14	Pasir Panjang	275,87
15	Perumnas I	225
16	Perumnas II	1.554,00
17	Perumnas III	50,9
18	Perumnas IV	122

<sup>6</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2024

19	Perumnas V	113
20	Perumnas VI	313
21	Rest Area Danau Sipin	2.416,00
22	Sanggar Batik	1.147,13
23	Simpang Angso Duo	241
24	Simpang Beringin	12
25	Simpang Polsek Danau Teluk	276,91
26	Simpang Pulai	466,47
27	Simpang Rumah Sakit Umum	130
28	Simpang 4 Purnama	113,04
29	Singkawang	300,01
30	Tanggo Rajo	248,47
31	Tepian Tembuku	916,79
32	TP Sriwijaya	487,13
33	Tugu Juang	10.671,16
34	Tugu Keris Siginjai	1.627,43
35	Tugu Peluru	3.394,00
36	Tugu Pers	354,57
37	Tugu PKK	1.210,15
38	Villa Kenali	3.331,00

*Sumber : Data Inventaris Taman, Median Jalan Dan Jalur Hijau Kota Jambi*

Sebagai kota yang merupakan ibukota Provinsi Jambi tentunya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan juga pemerintahan tentunya sejalan dengan itu

pembangunan di Kota Jambi juga akan berkembang pesat dan akan terus meningkat dari waktu ke waktu, Pembangunan tersebut akan berdampak pada perubahan Ruang Terbuka Hijau dari tahun ke tahun. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi adalah 2.231,69 ha dan Ruang Terbuka Hijau Privat adalah 1,76 ha. Yang seharusnya dibutuhkan 30% dari luas wilayah Kota Jambi untuk Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007. Tingginya angka kepadatan penduduk yang cukup pesat memberikan tekanan tinggi terhadap pemanfaatan ruang Kota Jambi. Pada tahun 2020 606,20 ribu jiwa yang mana setiap tahunnya akan bertambah terus menerus. Pertambahan jumlah penduduk di Kota Jambi berdampak pada kebutuhan ruang untuk hidup baik rumah, jalan, dan lainnya. Kemudian berlanjut pada kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau yang mana diharapkan mampu memberikan kebutuhan oksigen dan kenyamanan dari ruang yang tersisa.

Studi ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan dengan mengambil permasalahan pada ruang terbuka hijau. Lokasi penelitian ini adalah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi. Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dirawat dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak rusak akibat pengembangan yang diluar kendali oleh aktivitas wisata masyarakat, pengembangan serta perawatan ruang terbuka hijau taman haruslah dirawat dengan mempertahankan kualitas dari taman.

RTH merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat, selain itu mendukung manfaat ekologis, sosial,

budaya, ekonomi, dan estetika kota .<sup>7</sup>Jadi penting untuk mendukung agar pemeliharaan RTH tetap dilakukan. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan guna pemeliharaan RTH melakukan upaya pemeliharaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan tema yang akan diteliti yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh ABD Jabbar yang berjudul Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupaten Takalar<sup>8</sup>. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) wilayah kabupaten Takalar menggunakan 5 indikator yaitu 1) perencanaan, 2) analisis, 3) perancangan, 4) implementasi, dan 5) pemeliharaan. Guna mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan terbentuknya ruang terbuka hijau yang bersih serta kenyamanan masyarakat. Pembangunan ruang terbuka hijau di Takalar kurang mengaplikasikan ke masyarakat bahwasanya ruang terbuka hijau ini seperti ini, sehingga dari masyarakat kurang paham apa itu ruang terbuka hijau, padahal masyarakat juga sangat berperan penting karena keberhasilan dan kenyamanan itu ada sebagian di tangan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nila Rosawatiningsih tahun 2018 dengan judul Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora

---

<sup>7</sup> Yoga Gandara. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm 4

<sup>8</sup> ABD Jabbar. 2021 : *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupaten Takalar*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Kota Surabaya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif<sup>9</sup>. Hasil penelitian ini menyebutkan fungsi dari Taman Flora sangat kompleks yang mana meliputi fungsi edukasi, fungsi kesehatan, fungsi perekonomian dan fungsi interaksi. Seluruh fungsi tersebut bisa berjalan karena pemerintah, pengunjung, pihak swasta, pedagang, masyarakat, dan pengelola menjalankan peran yang disandang sesuai dengan statusnya. Setiap struktur yang menjalankan tugasnya dengan akan memberikan pengaruh yang terhadap kondisi Taman Flora Surabaya.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari segi persamaan adalah menganalisa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Selain persamaan penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan, perbedaan penelitian pertama selain tempat penelitian terdapat pula arah pembangunan Taman Singha Merjosari yang selalu mengalami perubahan desain setiap tahunnya yang tidak memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau, perbedaan pada penelitian yang kedua yaitu tempat penelitian, yang meneliti fungsi kompleks dari Ruang Terbuka Hijau Taman Flora yang menjadi taman kota besar dengan fasilitas penunjang lengkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada pengembangan serta pemeliharaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi terbilang minim perawatan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan alasan dan judul penelitian diatas serta beberapa permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengangkatan

---

<sup>9</sup> Nila Rosawatingsih, 2018 : *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya*, Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm 14

permasalahan proses dan pelaksanaan pada Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi dirasa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang rencana ruang terbuka hijau serta dalam kinerja pemeliharaan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kota Jambi dalam implementasi kebutuhan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi ruang terbuka hijau di Kota Jambi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Jambi dalam Implementasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi ruang terbuka hijau di Kota Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengembangan khazanah keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan serta menjadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

### **b. Secara Praktis**

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :

1. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum keseluruhan paham bagaimana mengenai Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.
2. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka hijau.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan salah satu konsep dalam Ilmu Pemerintahan bahwa disini pemerintah memiliki wewenang sebagai pemegang hak penuh atas sesuatu yang dikeluarkannya. Kebijakan (Policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi

antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara .<sup>10</sup>

Dari definisi kebijakan diatas, kebijakan dapat dikatakan sebagai ide, gagasan serta serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dan didalamnya terdapat unsur-unsur keputusan berupa upaya penentuan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu guna mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan sangat sering dipergunakan dalam konteks aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan untuk dicoba oleh aktor-aktor serta organisasi pemerintah. Program pemerintah dalam mengimplementasikan program RTH merupakan sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah Kota Jambi dan ditujukan untuk proses evaluasi yang mana mewujudkan kecocokan, keharmonisan dan dapat juga menyelamatkan kawasan sekitar . Dengan demikian, program pemerintah dalam melaksanakan RTH dapat dikatakan sebagai ide, gagasan, terobosan pemerintah dalam upaya keserasian ruang lingkung RTH dan kawasan buatan ruang terbuka hijau adalah inti dari sebuah perencanaan kota sehat.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terencana, disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi pada sisi lain

---

<sup>10</sup> Edi Suharto. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung,

merupakan fenomena kompleks dan mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Studi implementasi kebijakan yang secara sederhana didefinisikan sebagai proses penerjemahan kebijakan menjadi sebuah tindakan tidak muncul dalam waktu yang singkat. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan ada dua pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down implementasi kebijakan yang dilakukan terneutralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

Salah satu ilmuwan yang menganut dan aliran top down adalah George C. Edward III. Model implementasi dari George C. Edward III ini disebut Direct and Indirect Impact on Implementation. Model ini mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si., 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta, hlm. 68.

sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait<sup>12</sup>. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.<sup>13</sup>

a. Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementers) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan. Sebelum pejabat dapat

---

<sup>12</sup> Riant Nugroho, 2012, *Public Policy*, Jakarta: Gramedia, hlm. 191.

<sup>13</sup> Joko Widodo, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 97.

mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

#### b. Kejelasan

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno<sup>14</sup>. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

#### c. Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para

---

<sup>14</sup> Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita, hlm. 177.

pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif .<sup>15</sup>Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik .<sup>16</sup>Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

### a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.

### b. Informasi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* , Bandung: Alfabeta, hlm. 158

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Sikap atau Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.<sup>17</sup>

Banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian

---

<sup>17</sup> Joko Widodo, *Op.cit*, hlm. 104.

besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat tampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi salah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada<sup>18</sup>.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari:

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan

---

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Op.cit*, hlm. 194.

cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.<sup>19</sup>

#### 4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas<sup>20</sup>. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

##### a. Standard

Operational Procedure (SOP). Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (standard operational procedure). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang

---

<sup>19</sup> Leo Agustino, *Op.cit*, hlm. 152-153.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 153.

tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan pelaksana mungkin juga akan menghambat perubahan. Bila suatu badan memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan tersebut akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 150

### 1.5.2 Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan, “Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Menurut UU No. 26 tahun 2007, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan /mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam .<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya ekonomi, dan estetika. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya .<sup>23</sup>

Menurut Chafid Fandeli sebagaimana dikutip oleh Roswidyatmoko, Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota,

---

<sup>22</sup> UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

<sup>23</sup> Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ruang terbuka hijau merupakan wilayah yang luas dalam bentuk memanjang/jalur yang berisi tumbuhan dan tanaman yang memiliki berbagai manfaat. Keberadaan ruang terbuka hijau di sebuah perkotaan memiliki fungsi sebagai paru-paru kota. Dengan keberadaan ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjadi penyeimbang lingkungan di perkotaan. Seperti pengendali pencemaran udara, daerah resapan air, polusi yang ditimbulkan dari kendaraan.

#### **a. Tujuan Ruang Terbuka Hijau**

Dengan adanya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan memiliki berbagai macam tujuan. Menurut peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, tujuan penyelenggaraan ruang terbuka hijau adalah <sup>25</sup>:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

“Menurut Nirwono dan Iwan Ismaun, Tujuan pembangunan Ruang Terbuka Hijau merupakan sebagai infrastruktur di wilayah perkotaan yaitu dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian

---

<sup>24</sup> Roswidyatmoko Dwihatmojo, *Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan*.

<sup>25</sup> Peraturan menteri pekerjaan No. 5 Tahun 2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan<sup>26</sup>.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai tujuan ruang terbuka hijau, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang penting yang harus ada di sebuah perkotaan. guna meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, ruang terbuka hijau dapat menghasilkan udara yang bersih, menjaga ekosistem maupun sebagai daerah resapan air sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir. Oleh karena itu keberadaan ruang terbuka hijau dapat menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah perkotaan.

#### **b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Keberadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan memiliki fungsi yang beragam. Berdasarkan Inmendagri no.14/1988 dijelaskan Fungsi RTH kota yaitu sebagai berikut :

- 1) Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- 2) Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, kersasian dan keindahan lingkungan
- 3) Sarana rekreasi.
- 4) .Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara.
- 5) Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.

---

<sup>26</sup> Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% resolusi (kota) hijau*,:PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.Hlm 97.

- 6) Tempat perlindungan plasma nutfah.
- 7) Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- 8) Pengatur tata air.

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri No. 1 Tahun 2007, fungsi RTH dikawasan perkotaan adalah<sup>27</sup>:

- 1) Pengamanan keberdaan kawasan lindung perkotaan;
- 2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara;
- 3) Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- 4) Pengendali tata air; dan
- 5) Sarana estetika kota.

### **c. RTH Sebagai Objek Wisata**

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pemanfaatan RTH menjadi salah satu objek wisata di daerah merupakan salah satu fungsi pengembangan dari RTH.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berhasilnya suatu tempat berkembang menjadi daerah tujuan wisata (DTW) sangat tergantung kepada tiga faktor utama yaitu antara lain<sup>28</sup> :

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

<sup>28</sup> Muljadi A,J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 57.

- 1) Atraksi, dapat dibedakan menjadi: pertama, tempat : umpunya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah . kedua, Kejadian/Peristiwa : kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olahraga, festival dan sebagainya.
- 2) Mudah dicapai(Aksesibilitas) : Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedianya transportasi ke tempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman.
- 3) Amenitas : Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ke tempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya.

Sinergitas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Budaya dalam pemeliharaan RTH di Kota Jambi diharapkan mampu memberikan efek terhadap fungsi RTH sebagai salah satu objek wisata di Kota Jambi.

### **1.5.3 Evaluasi**

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar<sup>29</sup>. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa evaluasi adalah penilaian. Sejalan dengan hal tersebut, arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata- kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.<sup>30</sup>

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu: 1) Proses pembuatan kebijakan, 2) Proses implementasi kebijakan, 3) Konsekuensi kebijakan, 4) Efektivitas dampak kebijakan. Pembagian evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu: 1) *Planning and need evaluations*, 2) *Process evaluations*, 3) *Impact evaluations*, 4) *Efficiency evaluations*.<sup>31</sup>

Evaluasi kebijakan mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, sehingga sumber utama evaluasi kebijakan adalah implementasi kebijakan.

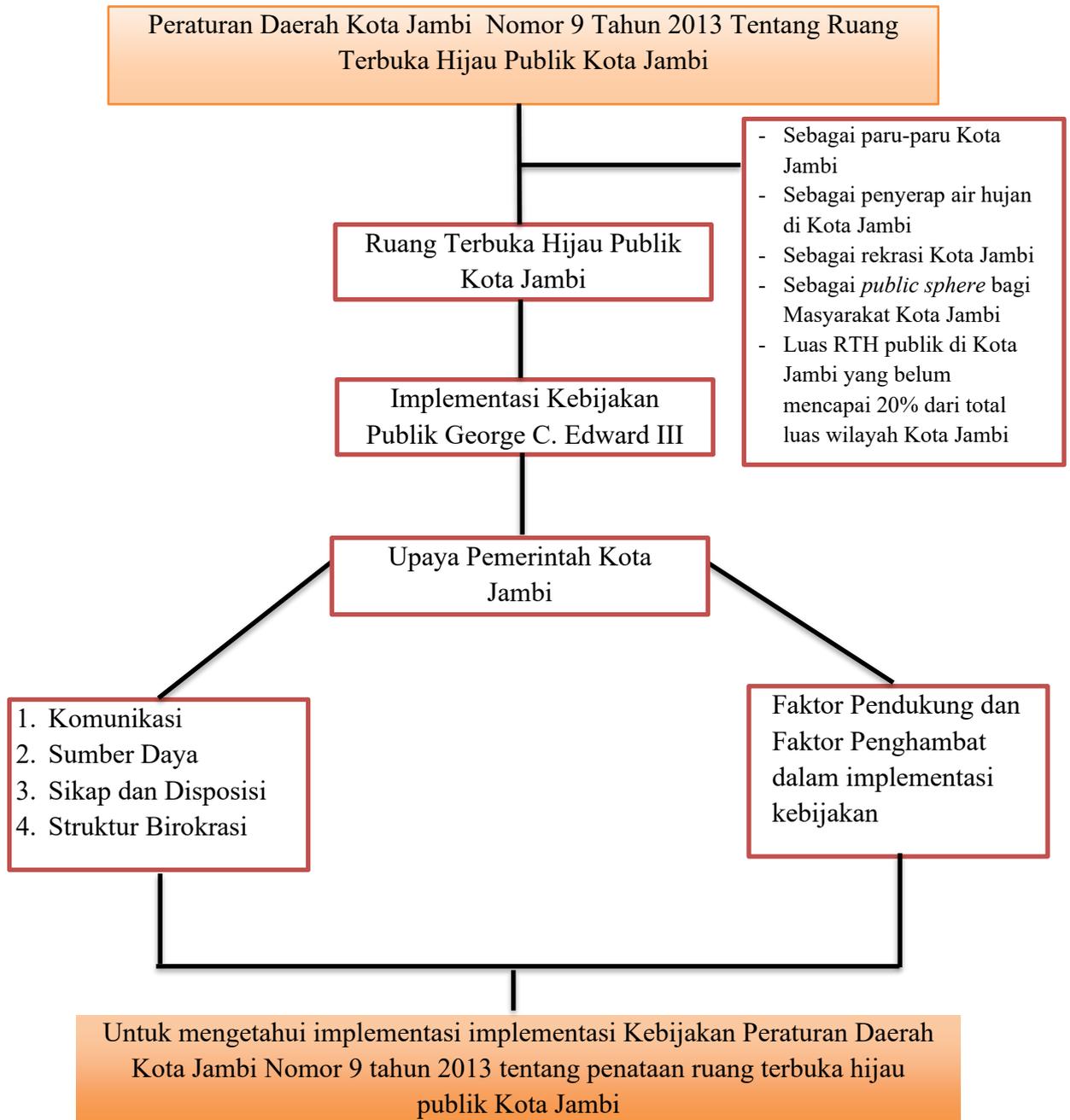
Pada proses evaluasi kebijakan terdapat tiga jenis pendekatan yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi semu merupakan jenis pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi secara valid tentang nilai dari suatu kebijakan tanpa memberikan pertanyaan terhadap responden mengenai manfaat dari kebijakan tersebut. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi secara valid tentang suatu kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Bentuk evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen, dan wawancara terhadap pembuat/pelaksana kebijakan untuk mengidentifikasi.

---

<sup>30</sup> Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

<sup>31</sup> Pall, G., 1987. Quality Process Management. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, hlm 59

## 1.6 Kerangka Pikir



## 1.7 Metode Penelitian

serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### 1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling. Penulis dalam peneliti kualitatif mencoba mengerti suatu makna kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dalam situasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian<sup>32</sup>. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang kemudian disajikan secara naratif<sup>33</sup>.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia yang terkadang berdasarkan perspektif peneliti itu sendiri dengan tujuan memahami objek secara mendalam<sup>34</sup>. Penelitian kualitatif juga menekankan pada analisis proses dengan cara berpikir induktif yang berkaitan dengan fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika

---

<sup>32</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 328

<sup>33</sup> Ibid.Muri Yusuf, Hlm. 329.

<sup>34</sup> Imam Gunawan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara Jakarta. Hlm. 80.

ilmiah<sup>35</sup>. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif (belum pasti/ berubah) dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.<sup>36</sup>

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang beralamat Kelurahan Paal Merah, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos 36129.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor riil di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian<sup>37</sup>. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap analisis implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (rth) kota jambi.

### **1.7.4 Sumber Data**

Secara umum terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen penelitian yang biasa meliputi : pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman pertanyaan (kuesioner)<sup>38</sup>. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *op.cit.*, hlm. 367.

<sup>38</sup> Pahrudin HM, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15

yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada.

### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (rich information). Teknik ini akan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami pelaksanaan Program RTH di Dinas Lingkungan Kota Jambi. Informan yang dipilih adalah dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

- a). Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
- b). Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan tanpa observasi karena fenomena telah lewat, diantaranya :

#### **a. Wawancara**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (Interviewer) dan sumber

informasi atau yang diwawancarai (Interviewee) melalui komunikasi langsung<sup>39</sup>. Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik .<sup>40</sup>

#### **b. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan masih berhubungan dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif<sup>41</sup>. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang<sup>42</sup>. Salah satu dokumen yang akan digunakan adalah dengan menggunakan penelitian atau karya ilmiah yang masih terkait dengan penelitian ini.

#### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

---

<sup>39</sup> A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 372.

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 160.

<sup>41</sup> A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 391.

<sup>42</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 176.

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain .<sup>43</sup>

Sementara itu penjabaran lain, analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan melakukan kategorisasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab<sup>44</sup>. Penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)<sup>45</sup>.

#### **1.7.8 Keabsahan Data**

Menurut Mantja triangulasi dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti wawancara dan dokumentasi atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan<sup>46</sup>. Variabel triangulasi yang peneliti gunakan adalah berdasarkan perolehan data wawancara dari unsur Dinas Lingkungan Kota Jambi. Informan yang dipilih adalah dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan . Triangulasi penulis gunakan dalam rangka memaksimalkan objektivitas penelitian.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

<sup>44</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 209.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 210-211.

<sup>46</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 217-218.